

REALIZING MDGS, RESTORING FORESTS

11th Regional Meeting of the Asia Forest Network
27-29 November 2006, RECOFTC, Bangkok, Thailand

RINGKASAN EKSEKUTIF

Translated by Ronald Ferdaus, Lembaga ARuPA

Perekonomian Asia terus berkembang, namun masyarakat sekitar hutan masih tetap tertinggal. Lebih dari dua pertiga masyarakat miskin dunia tinggal di wilayah pedesaan di Asia. Masyarakat yang bergantung pada hutan seringkali merupakan masyarakat termiskin dan terpinggirkan yang ditandai dengan kurangnya pelayanan dasar, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pendidikan, infrastruktur dasar yang buruk dan seringkali disertai keterbatasan akses terhadap pemerintahan dan aturan perundangan. Wilayah hutan seringkali menjadi sumber konflik yang serius. Deforestasi dan degradasi hutan yang masih terjadi terus menggerogoti fungsi hutan untuk pengentasan kemiskinan.

Sektor hutan berperan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goal* - MDG) mengingat pengaruhnya yang besar karena lahan hutan negara mempunyai persentase signifikan dalam menyusun wilayah daratan Asia. Sementara area produksi dan perlindungan di bawah departemen dan industri hutan memberikan kontribusi pada MDG melalui penyerapan tenaga kerja setempat dan hilir (*downstream*) serta pembangunan pedesaan, kontribusi sosial terbesar yang muncul dari sektor hutan saat ini adalah dari bidang pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management* - CFM).

Pertemuan regional *Asia Forestry Network* yang ke 11 telah dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2006 bekerjasama dengan *the Regional Community Forestry Training Center for Asia and Pacific* dengan dukungan dari *Japan Fund for Global Environment*. Lima puluh peserta dari tujuh negara memfokuskan diri pada kontribusi sektor hutan terhadap target global dalam pengurangan kemiskinan sebelum tahun 2015 di bawah Tujuan Pembangunan Milenium PBB. Para peserta mengkaji konsep-konsep dan ekspresi pembangunan manusia yang sedang berkembang serta bertukar pikiran dalam berbagai program dan rencana yang ditujukan untuk mengatasi kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang bergantung pada hutan.

Dalam mengkaji konsep-konsep dan ekspresi pembangunan manusia bersama-sama dengan isu-isu masyarakat hutan terkini, para peserta memastikan adanya kaitan yang kuat antara pengelolaan hutan masyarakat (CFM) dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDG) – bagaimana satu sama lain saling mempengaruhi. Peserta juga menyadari bahwa seringkali program CFM cenderung hanya merespon terhadap pengurangan kemiskinan (MDG 1) dan keberlanjutan lingkungan (MDG 7), dan meninggalkan kesehatan, pendidikan, gender, dan sekuritas manusia sebagai aspek-aspek yang dapat ditangani di kemudian hari atau ditinggalkan untuk diatasi oleh agen pembangunan lainnya. Setelah menyadari hal tersebut, banyak peserta yang menyatakan minat untuk mengembangkan metode lapangan untuk memperbaiki kaitan MDG dan CFM.

Kasus-kasus yang ditampilkan menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hutan dan pembangunan manusia dapat dicapai secara bersamaan jika masyarakat lokal yang tinggal di dalam atau sekitar wilayah kawasan lindung negara, dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, merasa bahwa mereka mendapatkan pembagian yang adil atas keuntungan dari melindungi hutan, dan mendapatkan kompensasi yang memadai atas hilangnya hak mereka. Ketidakseimbangan muncul bukan karena sifat tujuannya, tapi karena kawasan lindung biasanya ditetapkan melalui proses yang sentralistik dan cepat dalam menentukan batas kawasan dan pembagian zonasi wilayah pengelolaan. Seringkali penduduk baru mengetahui bahwa wilayahnya telah menjadi kawasan lindung atau konsesi setelah hal tersebut diumumkan, dan mereka tidak punya cara untuk mempertahankan hak mereka. Peserta pertemuan ini mengidentifikasi bahwa tujuan pengurangan kemiskinan dan kawasan lindung dapat disejalkan dengan memberi kesempatan penduduk lokal mengakses informasi dan ruang untuk partisipasi yang berkualitas dalam desain dan pengelolaan kawasan lindung.

Sementara desentralisasi memperluas peran pemerintah lokal dalam proses perencanaan dan penyediaan pelayanan-pelayanan dasar, pada kenyataannya rencana-rencana itu jarang terintegrasi karena keputusan klasifikasi lahan ditentukan hanya pada tingkat nasional. Peningkatan frekuensi bencana dan habisnya sumberdaya karena penggunaan lahan yang buruk mendorong munculnya aliansi multipihak di antara pemerintah lokal yang mencari jalan untuk merespon masalah sumberdaya alam di wilayah mereka. Pembentukan aliansi membantu pemerintah lokal mengalokasikan sumberdaya untuk pengelolaan satuan-satuan alam dari ekosistem terkait yang melintasi batas administratif (seperti teluk dan daerah aliran sungai), memperkuat suara dalam mendorong prioritas kepada otoritas perencanaan yang lebih tinggi, memformulasi kesepakatan yang berlaku atas seluruh wilayah, bukannya kebijakan terpisah per kabupaten atau propinsi dan bahkan memperluas kawasan lindung melalui inisiatif lokal. Peserta mendiskusikan apa yang dapat membuat aliansi multipihak berjalan lancar, tantangan apa yang mereka hadapi dalam mencapai tujuan bersama dan apa yang mempengaruhi keberlanjutan perjalanan mereka. Jalan untuk menciptakan sinergi dan menjaga kelangsungan aliansi lokal antar multipihak dianggap sebagai prioritas yang tinggi oleh peserta dalam diskusi lanjutan.

Penegakan hukum dan pengaturan hutan telah muncul menjadi strategi global negara-negara konsumen yang bertanggung jawab secara sosial untuk membatasi penebangan dan perdagangan kayu ilegal di negara-negara produsen dan konsumen. Dimensi internasional terhadap strategi ini sangat penting mengingat nilai ekonomis dari industri dan operasi yang sangat kuat diatur untuk memenuhi permintaan pasar. Akan tetapi, undang-undang kehutanan nasional dan cara undang-undang tersebut ditegakkan cenderung menyebabkan penangkapan kejahatan kehutanan akibat kebutuhan dan bukannya kejahatan akibat keserakahan. Pengembangan kebijakan internasional dari sisi suplai harus berjalan sesuai dengan kepedulian global untuk tidak lebih memarginalkan lagi pihak miskin dalam prosesnya dan menciptakan penderitaan lebih lanjut pada pihak yang paling memerlukan bantuan.

Arahan masa depan peserta menunjukkan ketertarikan pada pengembangan metode lapangan, dialog dan perencanaan lokal, dan pembagian pengetahuan regional.

--- 0 ---